PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RAHMAD NOOR**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **1000674**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 320.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/30 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 311.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, SUZUKI APV PU Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**113.350.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**30.915.275**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**775.765.275**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**775.765.275**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.